



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU KECAMATAN TALISAYAN



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan keuangan SKPD Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca ;
- 3) Laporan Operasional [LO];
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas [LPE] dan ;
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akruwal dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akruwal.

Talisayan , 05 Januari 2024

Pengguna Anggaran,



Ahmad Juhri, S.ST., M.PS.Sp

Pembina (IV a)

NIP. 19690918 199212 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas bimbingan, petunjuk dan segala berkat, rahmat serta karuniaNya sehingga kami dapat menyusun **Laporan Keuangan Kecamatan Talisayan** Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 ini dengan baik dan sistematis.

Laporan Keuangan ini dibuat dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang meliputi penjelasan, daftar terinci dan atau analisa atas kinerja SKPD Kecamatan Talisayan dengan basis akrual (Accrual basic) yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Talisayan Kab. Berau ini berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok pengelolaan keuangan daerah pasal 269 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akrual.

Kami sadar, laporan yang kami sajikan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan baik dalam hal materi maupun penyajiannya, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik maupun saran yang bersifat membangun dari pengguna (*Stake holder*) laporan ini, sebagai bahan koreksi bagi kami dan untuk melakukan perbaikan – perbaikan dimasa mendatang.



Talisayan, 05 Januari 2024

CAMAT TALISAYAN,

Ahmad Juhri, S.ST., M.PS.Sp

Pembina (IV a)

NIP. 19690918 199212 1 001

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab.....	i
Kata Pengantarii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Laporan Realisasi Anggaran	vii
Neraca.....	viii
Laporan Operasional (LO).....	x
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	xi
Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
BAB II.....	4
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN	4
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	4
2.1 Ekonomi Makro	4
2.2 Kebijakan Keuangan.....	4
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD	5
2.4 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	9
BAB III	11
IHKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	11
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD.....	11
3.1.1 Realisasi belanja berdasarkan sifatnya :	11
3.1.2 Realisasi belanja berdasarkan jenisnya :.....	11
3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan SKPD	12
3.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	12
3.2.2 Manajemen.....	12
BAB IV	14
KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
4.1 Entitas Pelaporan.....	14
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	14
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
4.4 Kebijakan Akuntansi.....	16
4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA	17
4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO.....	17
4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban	18
4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja.....	18

4.5.1 Kebijakan AKuntansi Transfer	18
4.5.2 Kebijakan AKuntansi Pembiayaan.....	18
4.5.3 Kebijakan AKuntansi Kas dan Setara Kas	19
4.5.4 Kebijakan AKuntansi Investasi jangka Pendek.....	19
4.5.5 Kebijakan Akuntansi Piutang.....	19
4.5.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan.....	20
4.5.7 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar	20
4.5.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban.....	20
4.5.9 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana	21
BAB V.....	22
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN.....	22
5.1 Penjelasan Pos-pos LRA.....	22
5.1.1 Pendapatan -LRA.....	22
5.1.2 Belanja.....	22
5.1.3 Transfer	23
5.1.4 Pembiayaan	24
5.2 Penjelasan Pos-pos NERACA.....	24
5.2.1 Aset.....	24
5.2.2 Kewajiban	27
5.2.3 Ekuitas Dana.....	28
5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)	29
5.3.1 Pendapatan LO.....	29
5.3.2 Beban	29
5.3.3 Kegiatan Non Operasional	30
5.3.4 Pos Luar Biasa	30
5.3.5 Surplus / Defisit – LO.....	30
BAB VI	31
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	31
6.1 Domisili	31
6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan Kegiatan Operasional	32
6.3 Struktur Organisasi	32
6.3.1 Sumber Daya Manusia	33
6.3.2 Bagan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah	38
BAB VII.....	40
KESIMPULAN PENTING TENTANG LAPORAN KEUANGAN	40
7.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI	44
BAB VIII.....	46
PENUTUP	46
Lampiran – Lampiran.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 01 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	5
Tabel 02 Neraca Tahun 2023.....	5
Tabel 03 Perbandingan Nilai pada Neraca antara Ta. 2022 dan Ta. 2023.	6
Tabel 04 Laporan Operasional (LO).....	7
Tabel 05 Laporan Perubahan Ekuitas.....	8
Tabel 06 Laporan Perubahan Ekuitas TA. 2022 dan TA. 2023.....	8
Tabel 07 Realisasi Anggaran Ta. 2023.....	10
Tabel 5.1.2 Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Jenisnya.....	28
Tabel 5.2.1 Rincian Aset SKPD Kecamatan Talisayan.....	29
Tabel 5.2.3 Perbandingan Ekuitas Tahun 2022 dan 2023.....	33
Tabel 5.3.2 Rincian Beban-LO Tahun Anggran 2023.....	34
Tabel 6.3.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Talisayan TA. 2023.....	38
Tabel 6.3.2 Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Ta. 2023.....	39
Tabel 6.3.3 Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan Ta. 2023.....	39
Tabel 6.3.4 Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Ta. 2023	40
Tabel 6.3.5 Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ta. 2023.	41
Tabel 7.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Talisayan TA. 2023.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01 Grafik Neraca Tahun 2023.....	5
Gambar 02 Grafik Perbandingan Nilai pada Neraca antara Ta. 2022 dan Ta. 2023.....	6
Gambar 03 Grafik Laporan Operasional (LO).....	7
Gambar 04 Grafik Laporan Perubahan Ekuitas.....	8
Gambar 05 Laporan Perubahan Ekuitas TA. 2022 dan TA. 2023.....	8
Gambar 5.1.2 Grafik Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Jenisnya....	28
Gambar 5.2.1 Grafik Perbandingan Aset Tetap TA. 2022 dan TA. 2023...	30
Gambar 5.2.3 Grafik Perbandingan Ekuitas Tahun 2022 dan 2023.....	33
Gambar 5.3.2 Grafik Rincian Beban-LO Tahun Anggaran 2023.....	35
Gambar 6.3.1 Grafik Jumlah Pegawai Kecamatan Talisayan TA. 2023...	38
Gambar 6.3.2 Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Ta. 2023.....	39
Gambar 6.3.3 Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan Ta. 2023	40
Gambar 6.3.4 Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural Ta. 2023.....	40
Gambar 6.3.5 Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ta. 2023.....	41
Gambar 6.3.6 Struktur Organisasi Kecamatan Talisayan Kab. Berau Ta. 2023.....	42

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau ditulis atau disusun dengan sistematis, menyajikan penjelasan secara naratif analisis dengan didukung oleh daftar, rekapitulasi dan keterangan lain agar dapat dipahami dengan mudah oleh *stake holder* dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang menggambarkan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama satu periode (1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023). Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) / Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2023 dengan relisasinya yang mencakup unsur – unsur belanja selama 1 Januari s/d 31 Desember 2023. **Realisasi Belanja Daerah** Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 5.900.364.538, (95,72%) dari jumlah Anggaran sebesar Rp. 6.164.047.750. Yang terdiri dari :

Belanja Operasional terealisasi	95,51%
Realisasi senilai	Rp. 5.262.611.538
dari Anggaran senilai	Rp. 5.509.758.750
Belanja Modal terealisasi	97,47%
Realisasi senilai	Rp. 637.753.000
dari Anggaran Senilai	Rp. 654.289.000

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 di sajikan pada daftar rekapitulasi sebagaimana daftar / Tabel di bawah ini :

TABEL .01
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

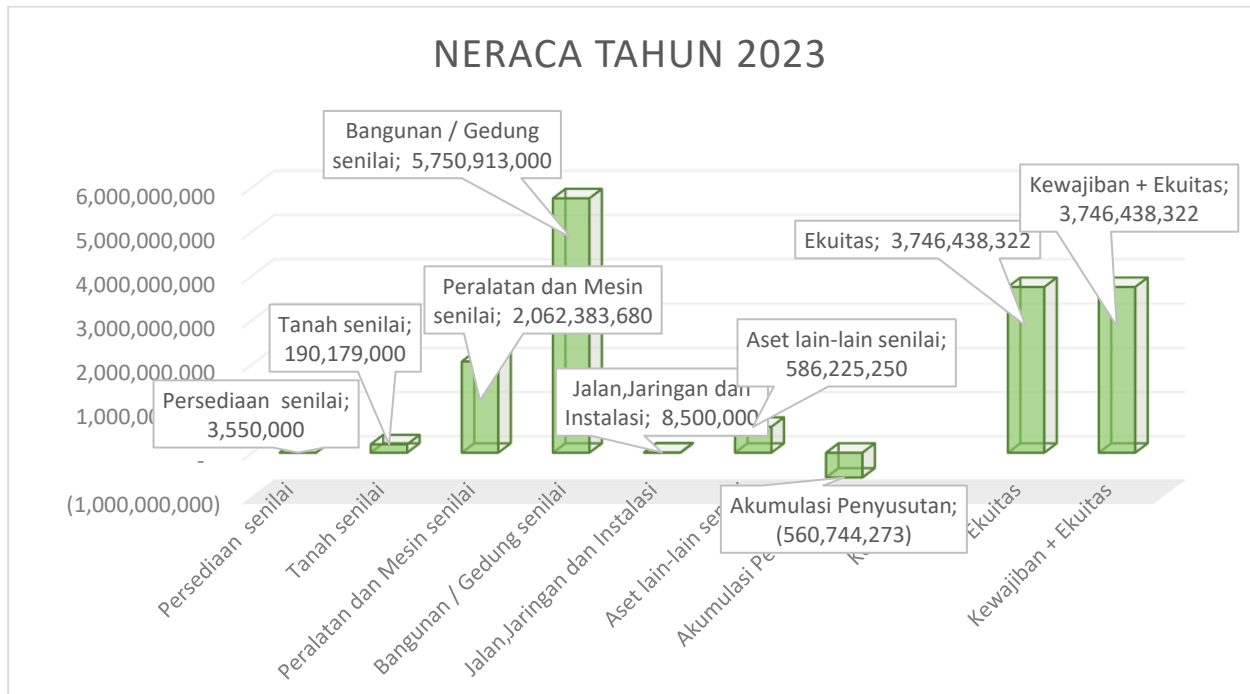
Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	Prosentase
Belanja Operasional	5.509.758.750	5.262.611.538	95,51%
Belanja Modal	654.289.000	637.753.000	97,47%
Penerimaan Pembiayaan	0	0	0,00%

2. Neraca

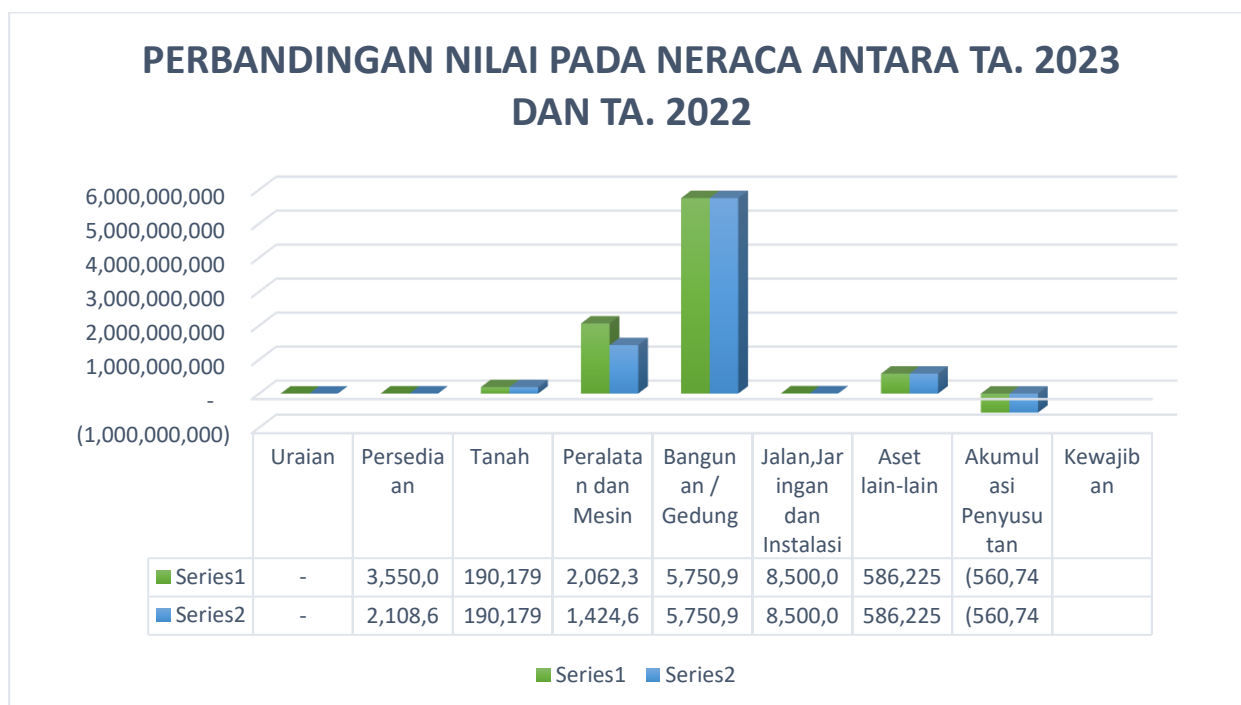
Laporan ini Menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu (31 Desember 2023). Neraca menggambarkan posisi ekuitas entitas Akuntansi (SKPD Kecamatan Talisayan) mengenai aset pada tanggal 31 Desember 2023. Ekuitas Akhir Kecamatan Talisayan per 31 Desember 2023 senilai **Rp 3.746.438.322** yang terdiri dari :

TABEL :02
NERACA TAHUN 2023

1	Persediaan senilai	3.550.000
2	Tanah senilai	190.179.000
3	Peralatan dan Mesin senilai	2.062.383.680
4	Bangunan / Gedung senilai	5.750.913.000
5	Jalan,Jaringan dan Instalasi	8.500.000
6	Aset lain-lain senilai	586.225.250
7	Akumulasi Penyusutan	(560.744.273)
8	Kewajiban	
9	Ekuitas	3.746.438.322
10	Kewajiban + Ekuitas	3.746.438.322

GRAFIK : 01**TABEL : 03****PERBANDINGAN NILAI PADA NERACA ANTARA TA. 2023 DAN TA. 2022**

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Persediaan	3.550.000	2.108.600
2	Tanah	190.179.000	190.179.000
3	Peralatan dan Mesin	2.062.383.680	1.424.630.680
4	Bangunan / Gedung	5.750.913.000	5.750.913.000
5	Jalan, Jaringan dan Instalasi	8.500.000	8.500.000
6	Aset lain-lain	586.225.250	586.225.250
7	Akumulasi Penyusutan	(560.744.273)	(560.744.273)
8	Kewajiban		
9	Ekuitas	3.746.438.322	3.254.108.737

GRAFIK : 02

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional ini menggambarkan jumlah beban yang ditanggung oleh entitas pelaporan dalam hal memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama satu periode (1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023). Laporan Operasional Kecamatan Talisayan adalah beban yang harus ditanggung oleh Entitas pelaporan dalam hal memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2022, senilai Rp. 4.629.159.250,00 seperti tabel di bawah ini :

TABEL : 04

No	Uraian	Nilai	
		TA. 2022	TA. 2023
1	Beban Pegawai - LO	2.766.499.393	3.118.166.055
2	Beban Barang dan Jasa-LO	1.722.412.226	2.144.445.483
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	139.497.031	139.497.031
	Jumlah	4,628,408,650	5,402,108,569

GRAFIK : 03

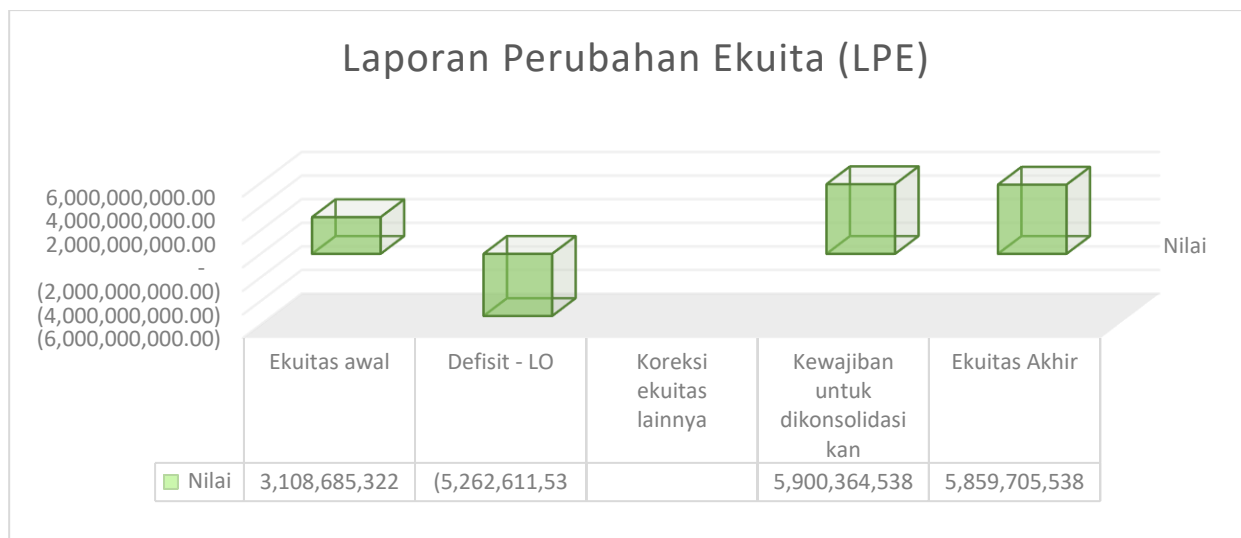
4. Laporan Perubahan Ekuita (LPE)

Laporan ini menyajikan gambaran perubahan Ekuitas Akhir entitas pelaporan (Kecamatan Talisayan) dimana terdapat ekuitas awal yang berasal dari ekuitas akhir tahun 2022 setelah Penggabungan (Konsolidasi dengan PPKD), ditambah Surplus – LO atau dikurangi defisit – LO pada tahun 2023, ditambah koreksi-koreksi yang langsung menambah dan atau mengurangi ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Talisayan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut :

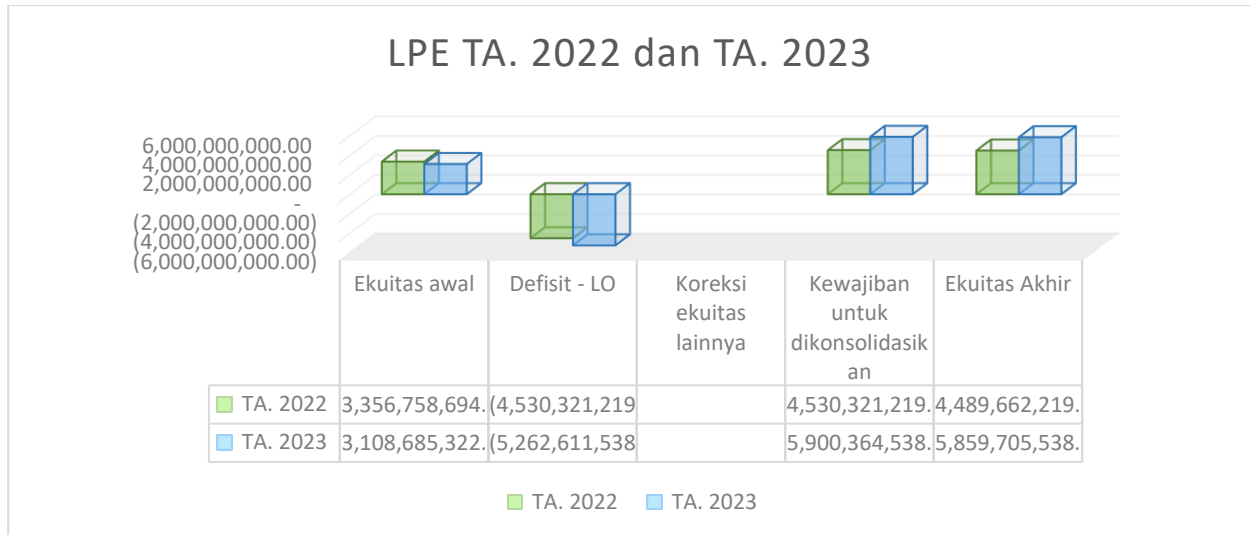
TABEL : 05

No	Uraian	Nilai
1	Ekuitas awal	3.108.685.322
2	Defisit - LO	(5.262.611.538,)
3	Koreksi ekuitas lainnya	
4	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	5.900.364.538
5	Ekuitas Akhir	5.859.705.538

GRAFIK : 04

**TABEL : 06**

No	Uraian	TA. 2022	TA. 2023
1	Ekuitas awal	3,356,758,694.00	3,108,685,322.00
2	Defisit - LO	(4,530,321,219.00)	(5,262,611,538.00)
3	Koreksi ekuitas lainnya		
4	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	4,530,321,219.00	5,900,364,538.00
5	Ekuitas Akhir	4,489,662,219.00	5,859,705,538.00

Grafik : 05

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan ini menyajikan penjelasan naratif analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Daftar rekapitulasi, Pos Non Keuangan disertai daftar pendukung lainnya (Tabel, Grafik, Lampiran-lampiran). Disusun dengan sistematis sehingga dapat lebih mudah cerna dan dipahami oleh semua pemangku kepentingan sebagai bahan masukan, evaluasi maupun sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk periode selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi akrual yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil yang diterima. Laporan keuangan juga merupakan kesimpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu instansi. Laporan keuangan adalah media yang paling penting untuk menilai kondisi ekonomi dan prestasi manajemen.

Setiap instansi memiliki tujuan khusus yang hendak dicapai. Kinerja instansi tercermin dari laporan keuangan yang disusun setiap tahun. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talisayan wajib menyusun Laporan Keuangan karena memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Laporan keuangan pemerintah daerah harus memberikan informasi secara terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders* agar terhindar dari kebiasaan karena kesalahan atas pengelolaan keuangan, baik itu berupa kesalahan atas pencatatan maupun penyelenggaraan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan pemerintah daerah.

Catatan atas laporan keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu dalam CaLK di kemukakan penjelasan pos – pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian laporan realisasi anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan *basis kas*, yaitu pendapatan dan atau pengeluaran diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui berdasarkan *basis akrual*, yaitu asset, diakui pada saat di perolehnya hak atas asset, kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau disusun dengan maksud dan tujuan untuk menyajikan informasi tentang pengelolaan Keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja yang dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan / kebijakan dan atau *stake holder* lainnya, memiliki akuntabilitas, kapabilitas dan ekuitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan kepada kami dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan tentang kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode laporan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran BAKD Nomor SE.900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan, Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akruwal;
16. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akruwal;
17. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
18. DPA-SKPD / DPPA-SKPD Kecamatan Talisayan Tahun Anggaran 2023.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD / APBD Perubahan setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pengelola keuangan entitas pelaporan selama satu periode, Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam anggaran.

Sebagai salah satu entitas pelaporan di lingkungan Kabupaten Berau, Kecamatan Talisayan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang wajib menyampaikan laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola untuk bahan koreksi dan dalam pengambilan kebijakan / keputusan dimasa berikutnya.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, baik laporan relisasi anggaran, neraca, laporan operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan daftar pendukung lainnya berpedoman pada Perbup Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akrual dan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Berau Berbasis Akrual yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan ini.

Anggaran Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau tahun 2023 sebesar **Rp. 6.164.047.750** yang terdiri dari :

TABEL. 07 REALISASI ANGGARAN TA. 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	Prosetase
Belanja Operasional	5.509.758.750	5.262.611.538,00	95,51%
Belanja Modal	654.289.000	637.753.000,00	97,47%
Jumlah	6.164.047.750	5.900.364.538,00	95,72%

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Indikator Pencapaian Kinerja SKPD kami sajikan dalam Tabel **Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan** (terlampir) sebagai salah satu bahan evaluasi bagi kami, auditor, maupun stake holder untuk menilai efektifitas maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dalam hal pengelolaan Keuangan yang dipercayakan kepada SKPD Kecamatan Talisayan dari proses Perencanaan Anggaran sampai dengan Realisasi.

Dari tabel tersebut dapat dilihat Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan maupun yang tidak mencapai target, dari uraian yang tertera dalam tabel dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran Murni 2023	Pagu Anggaran Perubahan 2023	Realisasi Anggaran 2023	Sisa Anggaran 2023	Prosentase
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
7.01.0.00.0.00.08.0000				KECAMATAN TALISAYAN					
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3,780,587,222	5,044,805,262	4,831,776,312	213,028,950	95.78
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,727,977,534	3,285,665,574	3,128,896,855	156,768,719	95.23
7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28,999,000	70,429,000	62,982,000	7,447,000	89.43
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	100
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	431,643,000	456,643,000	457,117,439	(474,439)	100
7	01	01	2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	21,000,000	471,000,000	455,700,000	15,300,000	96.75
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350,976,688	411,076,688	386,217,107	24,859,581	93.95
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,991,000	299,991,000	290,862,911	9,128,089	96.96
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	229,998,000	350,398,000	348,658,792	1,739,208	99.50
7	01	03	2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	229,998,000	350,398,000	348,658,792	1,739,208	99.50
7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45,302,000	45,302,000	43,235,590	2,066,410	95.44

7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45,302,000	45,302,000	43,235,590	2,066,410	95.44
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	603,943,408	723,542,488	676,693,844	46,848,644	93.53
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	603,943,408	723,542,488	676,693,844	46,848,644	93.53
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						Total Anggaran (Rp)			
					4,659,830,630	6,164,047,750	5,900,364,538	263,683,212	95.72

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 3,285,665,574** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 3,128,896,855 (95,23%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai target.

2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 70,429,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 62,982,000 (89,43%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 50,000,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 50,000,000 (100%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 456,643,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 457,117,439 (100%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 471,000,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 455,700,000 (96,75%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 411,076,688** secara fisik terealisasi sesuai target (95%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 386,217,107 (93,95%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan baik.

7) Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 299,991,000** secara fisik terealisasi sesuai target (98%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 290,862,911 (96,96%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan baik.

8) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 350,398,000** secara fisik terealisasi sesuai target (98%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 348,658,792 (99,50%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, Kegiatan ini berupa Honor Pejuang SIGAP yang terdiri dari 11 orang yaitu 1 orang Koordinator Kecamatan dan 10 orang Pendamping Kampung pada 10 Kampung yang ada di wilayah Kecamatan Talisayan. Pejuang SIGAP diberikan Honorarium per bulan berdasarkan SK Bupati dengan nilai Rp. 3.700.000,00 bagi Koordinator Kecamatan dan Rp. 3.200.000,00 bagi pendamping masing-masing kampung. Pejuang SIGAP adalah Tenaga Kontrak yang direkrut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau, sehingga dalam hal ini kecamatan hanya melaksanakan pembayaran honorarium setelah diterbitkannya SK Penempatan.

9) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan kantor dalam Pencegahan dan penanganan Penyebaran Covid-19 di wilayah Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 45,302,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 43,235,590 (95,44%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan baik karena kasus covid-19 terus menurun untuk wilayah Kecamatan Talisayan berzona Hijau sehingga kegiatan yang dilaksanakan meninjau kampung-kampung yang mengadakan acara keramaian.

10) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan kantor

dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 723,542,488** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 676,693,844 (93,53%)**, melihat kenyataan itu maka dapat disampaikan bahwa kegiatan belum dapat berjalan dengan baik.

2.4 Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kantor Camat Talisayan Kabupaten Berau ditulis atau disusun dengan sistematis, menyajikan penjelasan secara naratif analisis dengan didukung oleh daftar, rekapitulasi dan keterangan lain agar dapat dipahami dengan mudah oleh stake holder dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan , belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang menggambarkan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama satu periode (1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023).

2. Neraca

Laporan ini Menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu (31 Desember 2023).

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional ini menggambarkan jumlah beban yang ditanggung oleh entitas pelaporan dalam hal memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama satu periode (1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023).

4. Laporan Perubahan Ekuita (LPE)

Laporan ini menyajikan gambaran perubahan Ekuitas Akhir entitas pelaporan (Kantor Camat Talisayan) dimana terdapat ekuitas awal yang berasal dari ekuitas akhir tahun 2022 setelah Penggabungan (Konsolidasi dengan PPKD), ditambah Surplus – LO atau dikurangi defisit – LO pada tahun 2023, ditambah koreksi-koreksi yang langsung menambah dan atau mengurangi ekuitas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Talisayan Tahun Anggaran 2023 adalah uraian yang menyajikan penjelasan naratif analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ,
- Neraca,
- Laporan Operasional (LO),
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Pos Non Keuangan disertai bukti pendukung lainnya (Tabel, Grafik dan Daftar, surat maupun berita acara yang tergabung pada lampiran-lampiran) dan merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dari Laporan ini.

BAB III

IHKTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023, yaitu realisasi sebesar Rp. 5.900.364.538, (95,72%) dari Nilai Anggaran Sebesar Rp. 6.164.047.750 informasi selengkapnya seperti tersebut di bawah ini:

3.1.1 Realisasi belanja berdasarkan sifatnya :

❖ Belanja Operasil terealisasi	95,51%
Realisasi senilai	Rp. 5.262.611.538
dari Anggaran senilai	Rp. 5.509.758.750
❖ Belanja Modal terealisasi	97,47%
Realisasi senilai	Rp. 637.753.000
dari Anggaran Senilai	Rp. 654.289.000
❖ Penerimaan Pembiayaan Terealisasi	0,00%
Realisasi senilai	Rp. 0,00
dari Anggaran Senilai	Rp. 0,00

3.1.2 Realisasi belanja berdasarkan jenisnya :

❖ Belanja Pegawai.....	95,12%
Realisasi	Rp. 3.118.166.055
dari Anggaran Senilai	Rp. 3.278.185.574
❖ Belanja Barang dan Jasa.....	96,10%
Realisasi	Rp. 2.144.445.483
dari Anggaran Senilai	Rp. 2.231.573.176
❖ Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	97,47%
Realisasi	Rp. 637.753.000
dari Anggaran Senilai	Rp. 654.289.000

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan SKPD

Pada dasarnya hambatan dan atau kendala bagi SKPD Kecamatan Talisayan Tahun Anggaran 2023 dapat kami atasi dengan baik, sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai, namun demikian ada hal-hal yang sangat penting sehubungan dengan hal-hal yang bersifat **ONLINE** yaitu :

3.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

- terbatasnya tenaga yang ada dan sumber daya manusia (SDM);
- Keterbatasan Pegawai yang mengelola kegiatan-kegiatan teknis masih kurang memahami / menguasai aturan yang ada dikarenakan seringnya perubahan aturan sehingga walaupun sudah lama menjabat tetapi harus belajar dan belajar lagi.

Sumber daya manusia erat kaitannya dengan keberhasilan / pencapaian target kinerja yang hubungannya dengan kualitas outcome ataupun inovasi – inovasi dalam menghadapi fenomena dalam kaitannya mensukseskan Gerakan Revolusi Mental baik bagi aparatur itu sendiri maupun bagi Client / pelanggan, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Talisayan.

3.2.2 Manajemen

Manajemen adalah hal mendasar yang sangat menentukan sebuah organisasi ataupun instansi dapat mencapai target – target yang telah ditentukan dalam perencanaan.

Manajemen juga sangat erat dengan kapasitas dan Kapabilitas Sumberdaya yang tersedia, Baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya pendukung seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SMEP ONLINE), Standart Operasional dan Prosedur (SOP) , Penghargaan (Reward) dan Punishment (hukuman) dapat berjalan dengan baik, kendala yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian target adalah terbatasnya

tenaga yang ada dan sumber daya manusia (SDM), dimana Sebagian besar sumber daya yang mengelola hal-hal teknis belum mendapat bimbingan teknis, kursus atau diklat – diklat yang memadai dan atau Jabatan Fungsional yang menurut peraturan perundang-undangan harus diisi orang bersertifikat tidak dapat terpenuhi, serta masih adanya jabatan struktural yang belum terisi diantaranya adalah :

- 3.2.2.1 Belum ada Pegawai yang memiliki Sertifikat sebagai syarat untuk menjadi Pejabat Pengadaan Barang / Jasa;
- 3.2.2.2 Minimnya SDM yang menguasai/memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan Perpajakan;
- 3.2.2.3 Tidak adanya Penghargaan (reward) yang jelas bagi pegawai yang berprestasi (minimal mencapai target) maupun hukuman (Punishment) apa yang diberikan bagi pegawai yang kinerjanya tidak mencapai target, sehingga kinerja Aparatur Sipil Negara kurang kompetitif.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Pemerintahan Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas pelaporan.

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam Catatan atas Laporan Keuangan dimaksud ini adalah Kecamatan Talisayan, sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Kegiatan serta Syb Kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA – SKPD / DPPA – SKPD Tahun anggaran 2023, yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan keuangan pada periode pelaporan dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Entitas akuntansi dimaksud adalah salah satu OPD pada Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penunjang Administrasi Pemerintahan

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau adalah adalah *BASIS AKRUAL* yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi maupun peristiwa lainnya pada saat terjadinya transaksi maupun terjadinya peristiwa lainnya tanpa memperhatikan diterima dan / atau dikeluarkannya kas atau setara kas, berikut istilah-istilah yang dipakai pada Laporan Keuangan Kecamatan Talisayan Tahun 2023.

- **Anggaran** adalah rencana belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talisayan Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam DPA-SKPD / DPPA-SKPD;

- **Belanja** adalah semua pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuaitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 2023 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kecamatan Talisayan;
- **Kas** adalah uang tunai yang ada pada bendahara pengeluaran (Kas di Bendahara Pengeluaran) dan Saldo Bank Kaltimtara Cabang Tanjung Redeb pada Nomor Rekening 1191400018 (Kas pada Bank);
- **Persediaan** adalah Aset lancar yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional bukan dengan maksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, untuk Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Talisayan mempunyai Persediaan senilai Rp. 3.550.000 (berita acara inventarisasi & rekap persediaan terlampir);
- **Aset** adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Kecamatan Talisayan sebagai akibat dari Peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan /atau sosial di masa depan dapat diperoleh Kecamatan Talisayan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah maupun budaya;
- **Aset Lancar** Sumberdaya ekonomi yang berupa kas, setara kas, Piutang, beban yang harus dibayar dimuka (*porskot*) maupun Persediaan;
- **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dengan nilai minimal sama dengan atau diatas kapitalisasi;
- **Akumulasi Penyusutan senilai Minus Rp. 4.284.626.935** adalah jumlah penyusutan / *Amortisasi* aset tetap dari tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang mengurangi nilai ekonomis aset tetap tersebut;
- **kewajiban untuk dikonsolidasikan** senilai **Rp. 5.900.364.538**, adalah Nilai / Jumlah Belanja Operasi maupun Belanja Modal yang telah dilaksanakan oleh Entitas Akuntansi (Kecamatan Talisayan) yang harus dikonsolidasikan kepada PPKD (BPKAD Kabupaten

Berau) sebelum dilakukan penggabungan Laporan pada Entitas Pelaporan (Pemerintah Daerah Kabupaten Berau);

- **Ekuitas** (Neraca) senilai **Rp 3.746.438.322** adalah hasil penjumlahan Aset Lancar dan Aset Tetap dikurangi Jumlah Akumulasi Penyusutan dan Kewajiban per 31 Desember 2023.
- **Ekuitas Akhir (LPE)** senilai **Rp 3.746.438.322** atau sama dengan nilai Ekuitas pada neraca, itu menunjukkan adanya persamaan perhitungan antara Neraca dan LPE, sama halnya dengan Neraca apabila Ekuitas Akhir (LPE) ditambahkan dengan Nilai Kewajiban yang harus dikonsolidasikan maka akan diperoleh Nilai yang sama dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana pada Neraca.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Pengukuran yang dipakai oleh Entitas Akuntansi

(Kecamatan Talisayan) yaitu sebagai berikut:

- **Belanja** adalah semua pengeluaran yang mengurangi dana lancar dalam periode tahun bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya dan diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh PPK-SKPD dan / atau Bendahara Umum Daerah (BUD).
- **Aset** adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Kecamatan Talisayan sebagai akibat dari Peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan /atau sosial di masa depan dapat diperoleh Kecamatan Talisayan, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah maupun budaya;
- **Kewajiban** bagi Entitas akuntansi adalah kewajiban kepada PPKD berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan PFK serta Kewajiban untuk dikonsolidasikan;
- **Ekuitas Dana** yaitu Nilai yang menggambarkan Kekayaan Bersih entitas akuntansi pada akhir masa pelaporan yang nilainya tergambar pada Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang

dipilih oleh entitas pelaporan dalam menyusun dan penyajian laporan keuangan.

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan –LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Entitas Akuntansi (Kecamatan Talisayan) sesuai fungsinya tidak memiliki Pendapatan, maka dari itu tidak melaksanakan penatausahaan Pendapatan, sebagaimana ytergambar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Laporan Operasional (LO).

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Dalam hal ini **SKPD Kecamatan Talisayan tidak memiliki Pendapatan**, sehingga tidak ada pencatatan Pendapata-LRA maupun pelaksanaan Pendapatan-LO.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan Manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengurangi ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, Pada periode Pelaporan tahun 2023 Beban Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kecamatan Talisayan) senilai Rp. 5.262.611.538 adalah sebagai berikut :

Beban Pegawai	Rp. 3.118.166.055
Beban Barang dan Jasa	Rp. 2.144.445.483
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp. 0

4.5 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah adalah semua pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuaitas dana lancar dalam periode tahun anggaran 2023 yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kecamatan Talisayan.

4.5.1 Kebijakan AKuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain akibat dari peraturan perundang-undangan termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil. Kecamatan Talisayan adalah sebuah entitas Akuntansi dimana Transfer yang diperoleh adalah berupa Pemindahan dana dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kecamatan Talisayan pada Bankaltim Kaltara Cabang Tanjung Redeb pada nomor 1191400018 senilai Uang persediaan sebagai Kas Bendahara dan atau Senilai SPM-GU ,SPM-TU maupun pembayaran untuk kepentingan Operasional Kecamatan Talisayan senilai dan /atau SPM-LS yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.

4.5.2 Kebijakan AKuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggarannya bertujuan untuk menutupi defisit atau untuk mempergunakan surplus anggaran.

Kecamatan Talisayan sebagai salah satu Entitas Akuntansi di

bawah Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, tidak melaksanakan Akuntansi Pembiayaan karena hal itu dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah PPKD sebagai Penyusun Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Berau.

4.5.3 Kebijakan AKuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah seluruh alat pembayaran baik berupa uang Tunai dan /atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Dalam Hal ini Entitas Akuntansi Kecamatan Talisayan mengelola Kas yang berupa Kas Tunai di Bendahara Pengeluaran maupun yang berada pada Rekening pada Bankaltim Kaltara Cabang Tanjung Redeb pada nomor rekening 1191400018. Posisi Kas di bendahara pengeluaran dan pada Bankaltim Kaltara Cabang Tanjung Redeb pada nomor 1191400018 per 29 Desember 2023 senilai Rp. 0,00 (NIHIL). **Setara Kas** adalah investasi yang bersifat likuid, berjangka pendek ataupun investasi / piutang yang telah jatuh tempo yang dengan cepat dapat dijadikan Kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan, dalam hal ini Entitas Akuntansi Kecamatan Talisayan tidak memiliki dan atau tidak mengelola apa yang disebut dengan Setara Kas.

4.5.4 Kebijakan AKuntansi Investasi jangka Pendek

Investasi jangka Pendek adalah Investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. Sesuai fungsinya Entitas Akuntansi Kecamatan Talisayan tidak mempunyai / Mengelola Dana Investasi Jangka Pendek.

4.5.5 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang / hak dan atau manfaat yang dapat dinilai dengan uang yang akan diterima Debitur akibat dari trnasaksi / perjanjian maupun akibat dari peraturan perundang-undangan. Pada Pemerintah Daerah Piutang bisa berupa Piutang Pajak maupun Piutang Retribusi, namun bagi entitas akuntansi Kecamatan Talisayan yang paling mungkin hanya terjadi piutang pajak, itupun apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, baik pajak daerah maupun pajak-pajak pusat. Sedangkan pada tahun

anggaran 2023 tidak ada piutang pada Kecamatan Talisayan. **Piutang entitas akuntansi** Kecamatan Talisayan per 29 Desember 2023 senilai Rp. 0,00 (NIHIL).

4.5.6 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang berbentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada tanggal 31 Desember 2023 Kecamatan Talisayan memiliki Persediaan senilai Rp. 3.550.000.

4.5.7 Kebijakan Akuntansi Aset Non Lancar

Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah / entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan /atau social dimasa depan dapat diperoleh oleh pemerintah / entitas maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. **Aset Non Lancar / Long Term Asset** adalah Jenis aset yang dalam penggunaannya lebih dari 1 (satu) tahun dengan nilai diatas Kapitalisasi. Entitas akuntansi Kecamatan Talisayan memiliki Aset Non Lancar berupa **aset tetap** yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode pelaporan (12 bulan) yang terdiri dari **Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin** serta **Jaringan Instalasi Listrik Kantor**.

4.5.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

4.5.9 Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah Nilai yang menunjukkan kekayaan riil pada akhir masa pelaporan. Ekuitas Dana Kecamatan Talisayan pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana tercantum pada Neraca maupun pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) **bernilai sama** yaitu **Rp. 5.262.611.538** (*Lima milyar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah*).

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos LRA

5.1.1 Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurangan terhadap Pendapatan -LRA bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau tidak memiliki pendapatan.

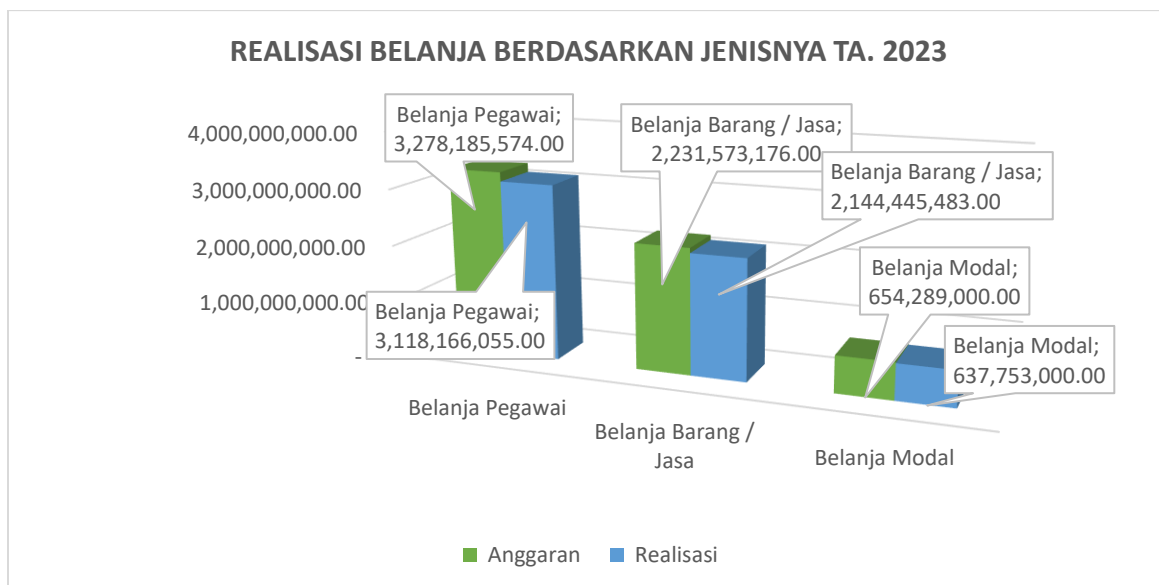
5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran melalui rekening kas Kecamatan Talisayan kabupaten Berau yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan pemerintah daerah tidak akan menerima perolehannya kembali. **Sesuai dengan sifatnya** belanja dapat dibedakan menjadi dua (Belanja Operasional dan Belanja Modal). Belanja Operasional adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang di rencanakan. Sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya penambahan nilai asset tetap. Dalam realisasi anggaran Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Tahun 2023 tersedia anggaran belanja **sebesar Rp. 6.164.047.750 dan belanja yang terealisasi sebesar Rp. 5.900.364.538,00** dengan Presentase realisasi **(95,72 %)** yang merupakan **Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal** selama tahun 2023.

Tabel : 5.1.2
Rincian Realisasi Belanja Berdasarkan Jenisnya

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Belanja Pegawai	3,278,185,574.00	3,118,166,055.00	92,12%
Belanja Barang / Jasa	2,231,573,176.00	2,144,445,483.00	96,10%
Belanja Modal	654,289,000.00	637,753,000.00	97,47%
Jumlah	6,164,047,750.00	5,900,364,538.00	95,72%

Gambar: 5.1.2
Grafik Realisasi Belanja Berdasarkan Jenisnya



5.1.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain akibat dari peraturan perundang-undangan termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil Kecamatan Talisayan sebagai Entitas Akuntansi tidak mengelola dana Transfer, tetapi hanya mengelola dana APBD yang tercantum dalam DPA-SKPD / DPPA-SKPD yang alokasinya sudah jelas dan pencairannya sesuai anggaran kas per triwulan.

5.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggarnya bertujuan untuk menutupi defisit atau untuk mempergunakan surplus anggaran. Kecamatan Talisayan sebagai Entitas Akuntansi tidak mempunyai dan tidak melaksanakan Akuntansi Pembiayaan karena hal itu dilaksanakan oleh Entitas Pelaporan dalam hal ini adalah PPKD sebagai Penyusun Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Berau, tetapi hanya mengelola dana APBD yang tercantum dalam DPA-SKPD / DPPA-SKPD yang alokasinya sudah jelas dan pencairannya sesuai anggaran kas per triwulan.

5.2 Penjelasan Pos-pos NERACA

5.2.1 Aset

Aset adalah Sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah / entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomidan /atau sosialdimasa depan dapat diperoleh oleh pemerintah / entitas maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 7.940.510.430,00** disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1

Rincian Aset SKPD Kecamatan Talisayan

Uraian	31-Des-2023	31-Des-2022	Kenaikan / (Penurunan)
Aset Lancar	5,108,600.00	2,108,600.00	3,000,000.00
Investasi Jangka Panjang	-	-	-
Aset Tetap	7,354,285,180.00	3,331,277,717.00	4,023,007,463.00
Aset lainnya	637,753,000.00	25,480,977.00	612,272,023.00
Dana Cadangan	-	-	-
Jumlah	7,997,146,780.00	3,358,867,294.00	4,638,279,486.00

Dari Tabel diatas dapat kami Jelaskan Sebagai berikut :

A. Yang Menambah Nilai Aset

Saldo Awal (Aset per 31 Desember 2023):	7,354,285,180
Belanja Modal Tahun ini	: 637,753,000
Persediaan Per 31 Desember 2023:	<u>0 +</u>
Jumlah	: 7,997,146,780

B. Yang Mengurangi Nilai Aset

Persediaan (Per 31 Desember 2023)	: 3,550,000
Penghapusan Aset	: 0
Penyusutan Tahun ini	: 0 +
Jumlah	: <u>3,550,000</u>
Nilai aset (a-b)	: 7,997,146,780

Gambar: 5.2.1

Grafik Perbandingan Aset Tetap TA. 2023 Dan TA. 2022



5.2.1.1 Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2023 pada entitas akuntansi Kecamatan Talisayan senilai Rp. 0 yang berupa Persediaan yang sampai pada tanggal 31 Desember 2023 belum terpakai, Sedangkan dana yang berada di kas bendahara pengeluaran yang terdiri dari kas tunai dan kas di Bankaltim kaltaratara cabang Tanjung Redeb pada nomor

rekening : **1191400018** telah pada posisi **nihil** pada tanggal 29 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Kas di Bendahara	Rp.	0,-
Piutang lain-lain	Rp.	0,-
Persediaan	Rp.	3.550.000,-

Sebagai pendukung atas posisi Kas / aset lancar entitas pelaporan Kecamatan Talisayan per 31 Desember 2023, bersama ini kami lampirkan :

- Print out Rekening Koran per 31 Desember 2023;
- Berita Acara Inventarisasi Persediaan dan;
- Kertas Kerja Rincian Persediaan per 31 Desember 2023.

5.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2023 pada entitas akuntansi Kecamatan Talisayan senilai Rp. **7.997.146.780** (*Tujuh milyar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah*) yang terdiri dari :

- **Tanah**

Tanah yang dimiliki Kecamatan Talisayan senilai Rp. 190.179.000,00 (*Seratus Sembilan puluh juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah*) yang terletak pada dua lokasi, yaitu : Rumah Dinas Camat, Rumah Dinas Sekcam, Pendopo, dan 2 kopel rumah dinas Staf;

- **Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan senilai Rp. 5.750.913.000,00 (*Lima milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*) berupa Kantor Camat, Pendopo, Rumah Jabatan Camat dan Rumah Dinas Sekcam dan 4 kopel rumah dinas staff.

- **Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin SKPD Kecamatan Talisayan per 31 Desember 2023 yaitu senilai **Rp. 1.404.693.180,00** (Satu milyar empat ratus empat juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu serratus delapan puluh rupiah) nilai tersebut diperoleh dari Belanja Modal.

- **Jalan, Jaringan dan Instalasi**

SKPD Kecamatan Talisayan juga memiliki Aset Tetap berupa Instalasi Listrik senilai **Rp. 8.500.000,00** (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

- Instalasi Listrik Rumah Dinas Camat kapasitas 2.200 Watt;
- Instalasi Listrik Rumah Dinas Sekcam dengan kapasitas 1.300 Watt.

- **Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah jumlah penyusutan / Amortisasi aset tetap sebesar Rp. 0,00 pada tahun 2023.

- **Aset lainnya**

Dalam hal **Aset Lainnya** yang ada pada OPD kami sebagaimana tergambar pada **Neraca** per 31 Desember 2023, adalah senilai Rp. 586.225.250,00.

5.2.2 Kewajiban

Kewajiban Entitas Akuntansi (Kecamatan Talisayan) atau **Utang** adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan atau kewajiban Entitas Akuntansi yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Kewajiban yang dimiliki oleh Entitas akuntansi Kecamatan Talisayan adalah senilai Rp. 0,00 (**NIHIL**).

5.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Kecamatan Talisayan adalah Gambaran Kekayaan Bersih yang dikuasai entitas akuntansi pada akhir masa pelaporan. Ekuitas per 31 Desember 2023 (Neraca) senilai **Rp 3,746,438,322,00** adalah hasil penjumlahan Aset Lancar dan Aset Tetap dikurangi Jumlah Penyusutan dan kewajiban selama tahun 2023 sebagaimana table dibawah ini.

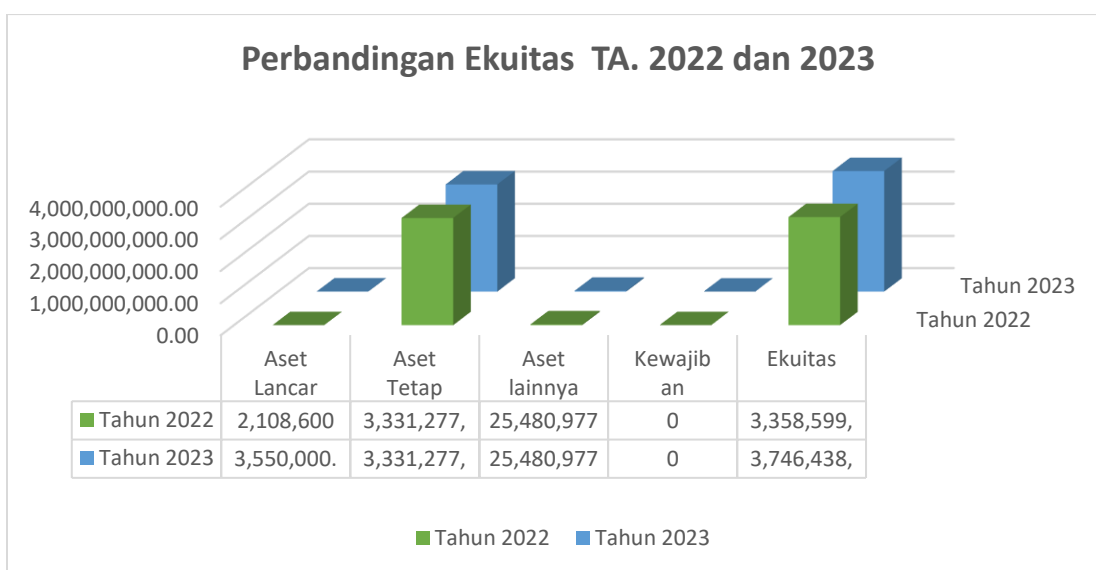
Tabel : 5.2.3

Perbandingan Ekuitas Tahun 2023 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Aset Lancar	2,108,600.00	3,550,000.00
Aset Tetap	3,331,277,717.00	3,331,277,717.00
Aset lainnya	25,480,977.00	25,480,977.00
Kewajiban	0	0
Ekuitas	3,358,599,194.00	3,746,438,322.00

Gambar: 5.2.3

Grafik Perbandingan Ekuitas Tahun 2022 Dan 2023



5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

5.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah Pendapatan yang dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam halbesran pengurangan terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variable terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau tidak memiliki pendapatan, maka dari itu entitas akuntansi Kecamatan Talisayan tidak melaksanakan pendapatan LO.

5.3.2 Beban

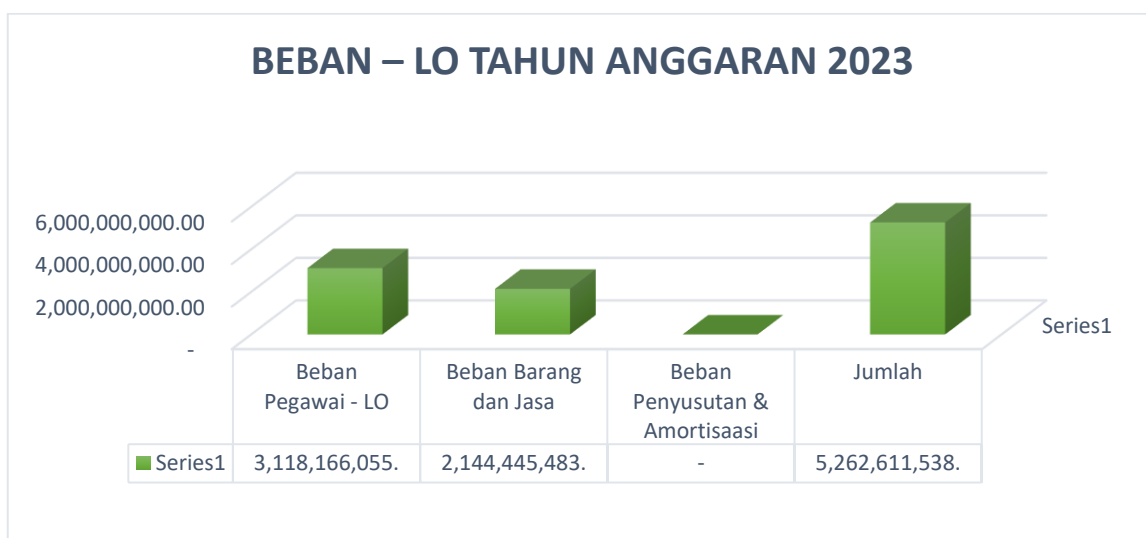
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi ataupun jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang bisa berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, atau dalam pengertian yang lain **beban** adalah kewajiban entitas yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Beban-LO yang harus ditanggung oleh Entitas Akuntansi dalam hal memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023, Senilai Rp. 4.841.269.407,00 sebagaimana tabel dan Grafik di bawah ini :

Tabel : 5.3.2.

Rincian Beban- LO Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai – LO	3,118,166,055.00
2	Beban Barang dan Jasa	2,144,445,483.00
3	Beban Penyusutan & Amortisaasi	-
	Jumlah	5,262,611,538.00

Gambar: 5.3.2
Grafik Beban – LO Tahun Anggaran 2023



5.3.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional adalah Kegiatan / peristiwa akuntansi / transaksi yang sifatnya tidak rutin yang dapat menyebabkan terjadinya Pendapatan maupun beban sehingga menimbulkan Surplus / Defisit akibat dari kegiatan tersebut.

5.3.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar biasa atau Beban Luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan operasi biasa, tidak diharapkan rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas akuntansi / entitas pelaporan. Dalam hal ini entitas akuntansi Kecamatan Talisayan pada tahun pelaporan 2023 tidak memiliki Pos **Luar biasa**.

5.3.5 Surplus / Defisit – LO

Surplus / Defisit – LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus / defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada periode pelaporan tahun 2023 entitas akuntansi Kecamatan Talisayan mengalami defisit-LO sebesar **Rp. 5.262.611.538,00** dengan penjelasan sebagai berikut :

Pendapatan-LO	:	Rp.	0,00
Beban-LO	:	Rp. 5.262.611.538,00	-
Defisit – LO	:	-Rp. 5.262.611.538,00	

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili

Kecamatan Talisayan yang merupakan salah satu Kecamatan dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau, Terletak di wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Berau dengan wilayah yang terdiri dari daratan, pegunungan dan pantai.

Domisili / Alamat Kantor Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

Alamat Kantor : **Jl. Soekarno – Hatta Talisayan RT. 09**

Kode Pos : 77372

Telepon : -

Alamat Email : Kec_talisayan@beraukab.go.id

Website : www.kec-talisayan.beraukab.go.id

Sosial Media :
(Instagram)



KECAMATAN_TALISAYAN

Kecamatan Talisayan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kampung yaitu :

1. Kampung Talisayan;
2. Kampung Dumaring;
3. Kampung Capuak;
4. Kampung Tunggal Bumi;
5. Kampung Bumi Jaya;
6. Kampung Campursari;
7. Kampung Suka Murya;
8. Kampung Purnasari Jaya;
9. Kampung Eka Sapta;
10. Kampung Sumber mulya.

6.2 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan Kegiatan Operasional

Entitas Akuntansi adalah Kecamatan Talisayan yang melakukan kegiatan operasional dengan landasan hukum sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Berau Nomor 80 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan.

➤ Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Pasal 17 Bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat dengan tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat sebagai Pimpinan di wilayah Kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- (1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- (4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- (6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- (7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

6.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pelayanan Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

6.3.1 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah pegawai Aparatus Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau sebanyak 41 orang dengan rincian sebagai berikut :

6.3.1.1 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

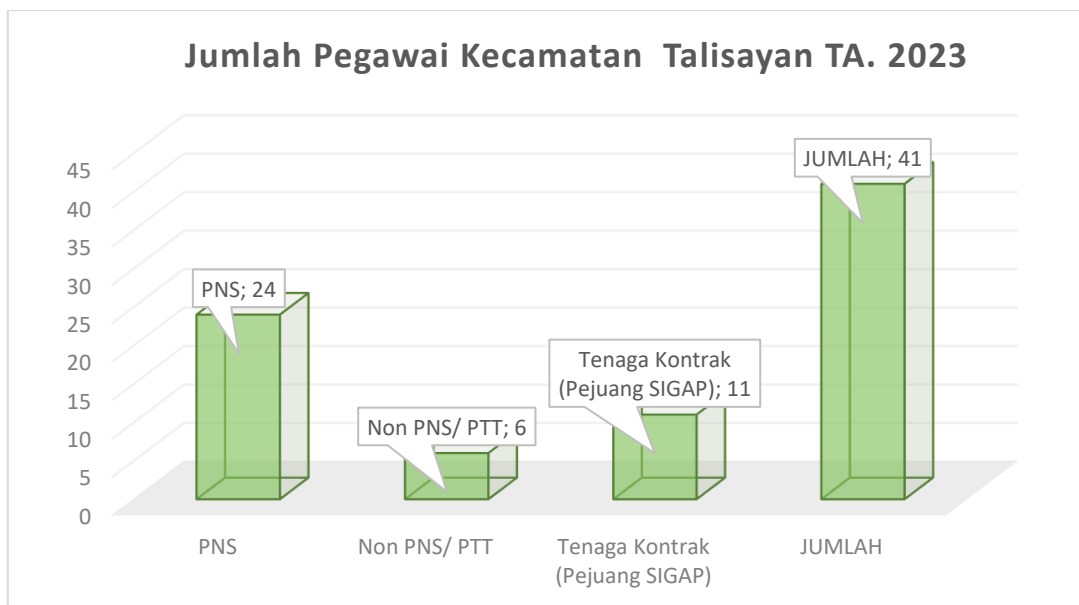
Jumlah Pegawai Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau sampai bulan Desember 2023 sebanyak 41 orang (termasuk Pejuang SIGAP Koordinator Kecamatan dan Fasilitator Kampung yang ditempatkan di Kampung-kampung) terdiri dari :

Tabel. 6.3.1.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Talisayan TA. 2023

No	Uraian	Jumlah
1	PNS	24
2	Non PNS/ PTT	6
3	Tenaga Kontrak (Pejuang SIGAP)	11
JUMLAH		41

Gambar. 6.3.1.1
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaiannya
TA. 2023

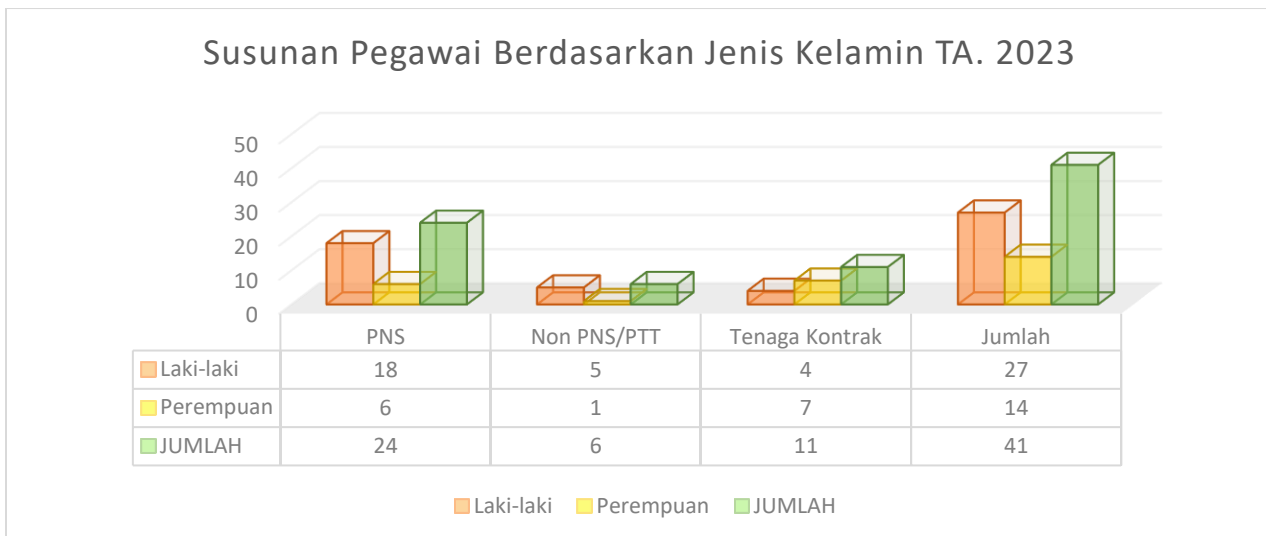


6.3.1.2 Susunan Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai Kecamatan Talisayan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis Kelamin dengan jumlah 41 orang yang terdiri laki-laki 27 orang dan perempuan 14 orang.

Tabel 6.3.2.
Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Ta. 2023

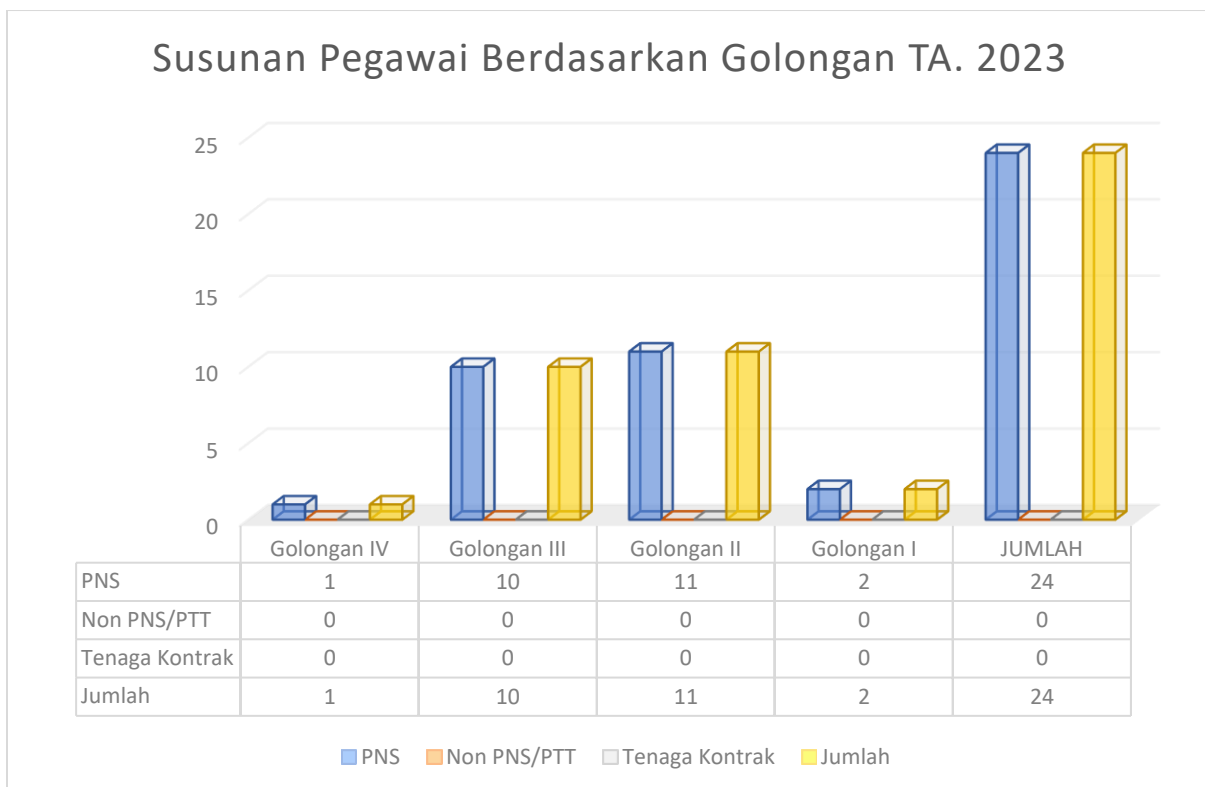
No	Uraian	PNS	Non PNS/PTT	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	Laki-laki	18	5	4	27
2	Perempuan	6	1	7	14
	JUMLAH	24	6	11	41

Gambar. 6.3.2**Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Ta. 2023****6.3.1.3 Golongan**

Jumlah pegawai negeri sipil Kecamatan Talisayan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis Golongan dengan jumlah 24 orang yang terdiri golongan (IV) 1 orang, golongan (III) 10 orang, golongan (II) 11 orang dan golongan (I) 2 orang.

Tabel 6.3.3**Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan TA. 2023**

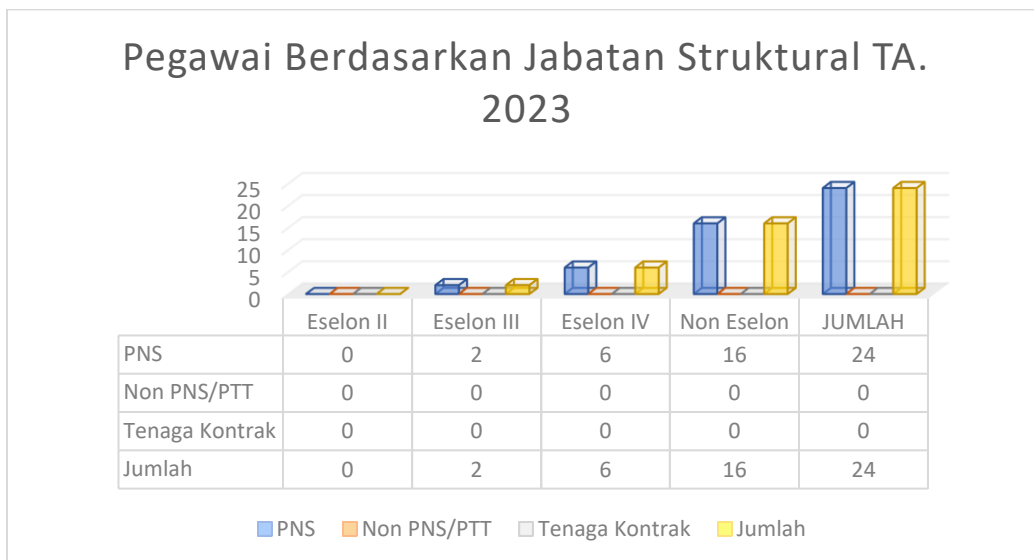
No	Uraian	PNS	Non PNS/PTT	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	Golongan IV	1	-	-	1
2	Golongan III	10	-	0	10
3	Golongan II	11	0	-	11
4	Golongan I	2	-	-	2
JUMLAH		24	0	0	24

Gambar. 6.3.3**Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongannya Ta. 2023****6.3.1.4 Jabatan Struktural**

Jumlah pegawai negeri sipil Kecamatan Talisayan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jabatan Struktural dengan jumlah 24 orang yang terdiri eselon (II) 0 orang, eselon (III) 2 orang, eselon (IV) 6 orang dan non eselon 16 orang.

Tabel 6.3.4**Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural TA. 2023**

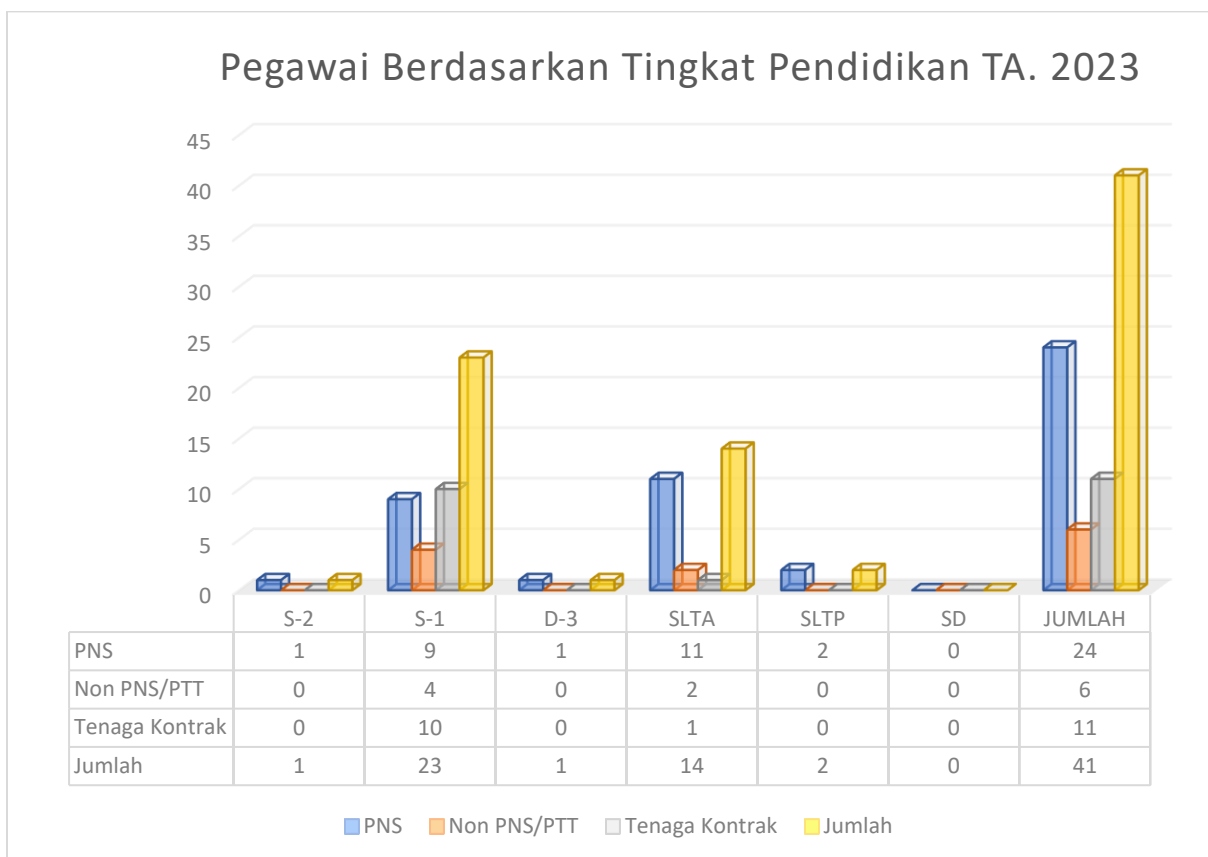
No	Uraian	PNS	Non PNS/PTT	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	Eselon II	-	-	-	-
2	Eselon III	2	-	-	2
3	Eselon IV	6	-	-	6
4	Non Eselon	16	0	0	16
JUMLAH		24	0	0	24

Gambar 6.3.4**Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural TA. 2023****6.3.1.5 Tingkat Pendidikan**

Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Kecamatan Talisayan berdasarkan tingkat pendidikan Tahun Anggaran 2023 berjumlah 41 orang.

Tabel 6.3.5**Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan TA. 2023**

No	Uraian	PNS	Non PNS/PTT	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	S-2	1	0	0	1
2	S-1	9	4	10	23
3	D-3	1	0	-	1
4	SLTA	11	2	1	14
5	SLTP	2	0	-	2
6	SD	0	0	-	0
JUMLAH		24	6	11	41

Gambar 6.3.5**Grafik Susunan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan TA. 2023****6.3.2 Bagan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah**

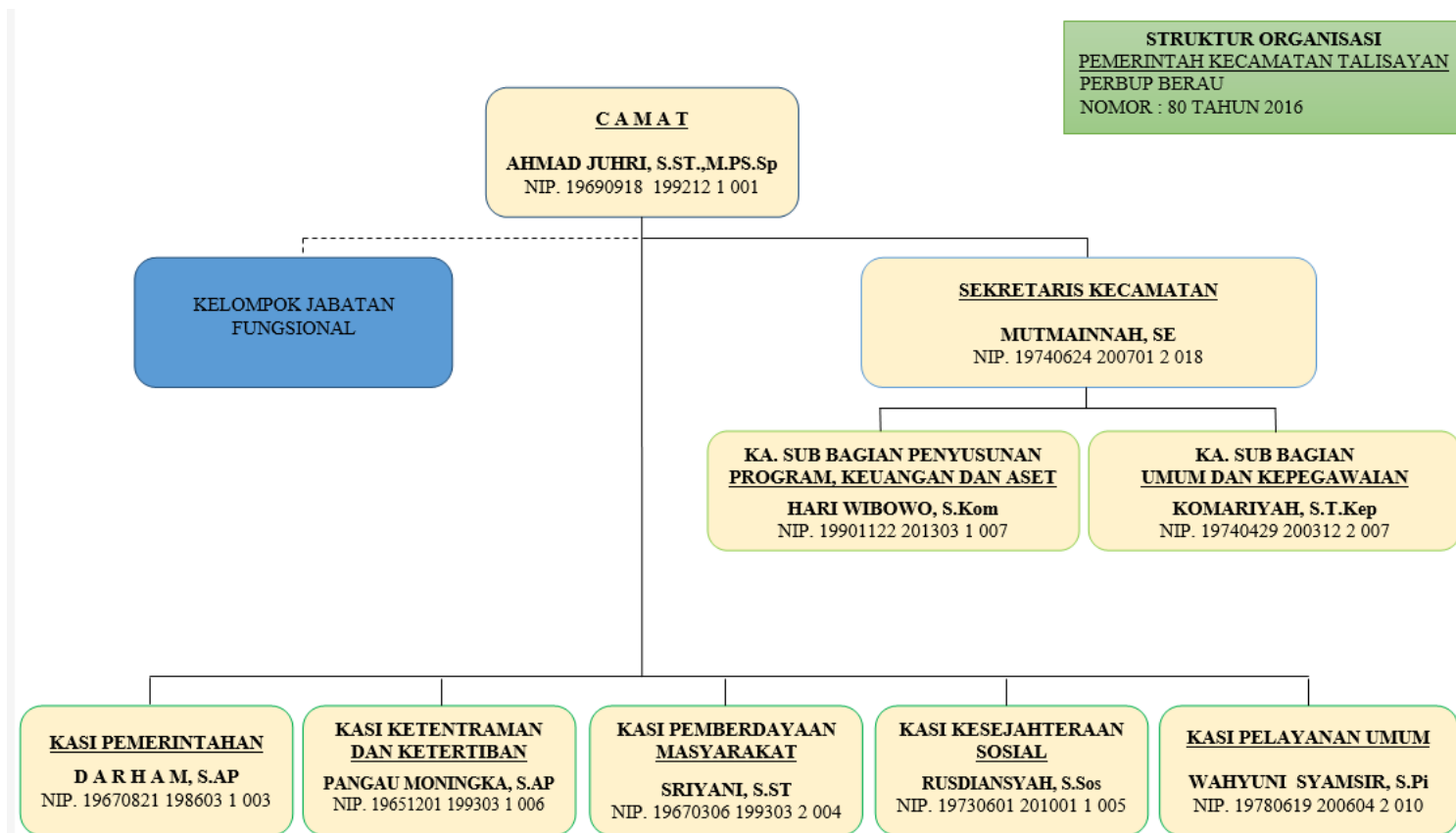
Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Kecamatan Talisayan Tahun 2023 berjumlah 41 orang yang terdiri 24 orang Pegawai Negeri Sipil, Non PNS/PTT terdiri 6 orang dan Tenaga Kontrak ini adalah Koordinator Kecamatan 1 orang dan Fasilitator Kampung 10 orang sehingga total tenaga kontrak adalah terdiri 11 orang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Talisayan Tahun Anggaran 2023 masih terdapat kekosongan jenjang Jabatan Struktural yaitu eselon IV pada Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset.

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Talisayan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 6.3.6

Struktur Organisasi Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau TA. 2023



BAB VII KESIMPULAN PENTING TENTANG LAPORAN KEUANGAN

7.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN TALISAYAN TA. 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Murni 2023	Pagu Anggaran Perubahan 2023	Realisasi Anggaran 2023	Sisa Anggaran 2023	Prosen tase	OPD Penang gung Jawab
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%	
1					2	4	5	6	7	8	9
1					Administrasi Pemerintahan						
1					Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan						
7.01.0.00.0.00.08.0000					KECAMATAN TALISAYAN						
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3,780,587,222	5,044,805,262	4,831,776,312	213,028,950	95.78	Kecam atan Talisayan
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,727,977,534	3,285,665,574	3,128,896,855	156,768,719	95.23	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,677,988,534	3,180,686,574	3,028,046,055	152,640,519	95.20	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	49,989,000	104,979,000	100,850,800	4,128,200	96.07	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28,999,000	70,429,000	62,982,000	7,447,000	89.43	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28,999,000	70,429,000	62,982,000	7,447,000	89.43	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	100.00	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-	100.00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	431,643,000	456,643,000	457,117,439	(474,439)	100.10	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	271,648,000	271,648,000	270,141,000	1,507,000	99.45	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,999,000	14,999,000	14,084,000	915,000	93.90	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	69,996,000	69,996,000	73,183,000	(3,187,000)	104.55	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75,000,000	100,000,000	99,709,439	290,561	99.71	
7	01	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	21,000,000	471,000,000	455,700,000	15,300,000	96.75	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	21,000,000	471,000,000	455,700,000	15,300,000	96.75	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350,976,688	411,076,688	386,217,107	24,859,581	93.95	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,993,000	3,993,000	3,914,000	79,000	98.02	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89,984,000	89,984,000	72,831,100	17,152,900	80.94	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Murni 2023	Pagu Anggaran Perubahan 2023	Realisasi Anggaran 2023	Sisa Anggaran 2023	Prosen tase	OPD Penang gung Jawab	
						Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%		
1					2	4	5	6	7	8	9	
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	20,000,000	19,958,000	42,000	99.79		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	236,999,688	297,099,688	289,514,007	7,585,681	97.45		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169,991,000	299,991,000	290,862,911	9,128,089	96.96		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134,991,000	164,991,000	156,142,911	8,848,089	94.64		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35,000,000	135,000,000	134,720,000	280,000	99.79		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	229,998,000	350,398,000	348,658,792	1,739,208	99.50		
7	01	03	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	229,998,000	350,398,000	348,658,792	1,739,208	99.50		
7	01	03	2	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	229,998,000	350,398,000	348,658,792	1,739,208	99.50		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	45,302,000	45,302,000	43,235,590	2,066,410	95.44		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45,302,000	45,302,000	43,235,590	2,066,410	95.44		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	45,302,000	45,302,000	43,235,590	2,066,410	95.44		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	603,943,408	723,542,488	676,693,844	46,848,644	93.53		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	603,943,408	723,542,488	676,693,844	46,848,644	93.53		
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	58,247,200	71,447,200	68,247,000	3,200,200	95.52		
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75,000,000	75,000,000	74,642,000	358,000	99.52		
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	470,696,208	577,095,288	533,804,844	43,290,444	92.50		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							Total Anggaran (Rp)					
						4,659,830,630	6,164,047,750	5,900,364,538	263,683,212	95.72		

Dari Tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun anggaran 2023 Kecamatan Talisayan melaksanakan 4 program yang terdiri dari 10 kegiatan dan 20 sub kegiatan merupakan kegiatan rutin untuk memenuhi operasional perkantoran, berjalan sangat baik.

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 3,285,665,574** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 3,128,896,855 (95,23%)**.

2) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 70,429,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 62,982,000 (89,43%)**.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 50,000,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 50,000,000 (100%)**.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 456,643,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 457,117,439 (100%)**.

5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 471,000,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 455,700,000 (96,75%)**.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 411,076,688** secara fisik terealisasi sesuai target (95%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 386,217,107 (93,95%)**.

7) Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 2 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional rutin kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 299,991,000** secara fisik terealisasi sesuai target (98%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 290,862,911 (96,96%)**.

8) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 350,398,000** secara fisik terealisasi sesuai target (98%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 348,658,792 (99,50%)**.

9) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan kantor dalam Pencegahan dan penanganan Penyebaran Covid-19 di wilayah Kecamatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 45,302,000** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 43,235,590 (95,44%)**.

10) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan yang dipergunakan untuk kegiatan kantor dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 723,542,488** secara fisik terealisasi sesuai target (100%) sedangkan secara keuangan terealisasi sebesar **Rp. 676,693,844 (93,53%)**.

7.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. PERMASALAHAN

- ❖ **Sumberdaya Manusia** merupakan salah satu permasalahan yang mengakibatkan terjadinya kelambatan dan atau kurang maksimalnya kinerja manajemen dalam melaksanakan suatu kegiatan yang terencana maupun dalam menghadapi situasi-situasi yang bersifat insidental sehubungan dengan kegiatan yang tidak direncanakan tetapi harus dilaksanakan demi untuk melayani konsumen (masyarakat).
- ❖ **Sarana dan Prasarana** adalah instrumen yang sangat penting dan signifikan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan maupun untuk merespon kegiatan – kegiatan yang tidak terencana sehubungan dengan pelayanan terhadap konsumen (masyarakat). **Sarana Prasarana** yang paling mempengaruhi kinerja manajemen baik dalam rangka pencapaian target maupun pelayanan reguler terhadap konsumen (masyarakat).
- ❖ **Sumber Dana / Anggaran** dari 20 Sub Kegiatan pada Program dan kegiatan Tahun Anggaran tidak ada realisasi dibawah 80%, ini menunjukkan bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

B. SOLUSI

- ❖ **Sumberdaya Manusia** sangat penting kedudukannya dalam hal pelaksanaan pencapaian target kinerja, untuk mengatasinya sehubungan dengan personil maka beberapa orang harus melaksanakan beberapa tugas dan tanggungjawab, walaupun bisa menimbulkan inefektifitas tetapi minimal setiap kegiatan harus ada yang melaksanakan dan mempertanggung jawabkannya. **Sehubungan dengan profesionalisme** kami masih selalu menyampaikan usulan agar **Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur sub kegiatan** *Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan* mendapat alokasi dana yang memadai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur.

❖ Sumber Dana / Anggaran**1. Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan atau Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tanjung Redeb dan luar Kabupaten Berau, maka Anggota TP. PKK dan atau seseorang yang menjadi utusan untuk mengikuti acara. Biaya yang timbul dan tidak mendapat alokasi anggaran pada DPA-SKPD akan dimintakan kepada Ketua Dewan Pembina (Camat) untuk transportasi TP. PKK meminta kepada Ketua Dewan Pembina (Camat) agar dapat mempergunakan kendaraan dinas / Operasional Kecamatan. Untuk Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi ke Kampung-kampung TP. PKK meminta agar dapat difasilitasi dan dapat memanfaatkan Kendaraan Dinas operasional. Selanjutnya kami menyampaikan usulan agar alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

BAB VIII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan sebagai wujud tanggungjawab atas sumberdaya ekonomi yang dipercayakan oleh Pemerintah Daerah untuk kami kelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sesuai peraturan preundang-undangan yang berlaku.

Kami telah berusaha semampu kami dalam menyajikan CaLK ini secara sistematis, naratif dan konseptual, dengan harapan bisa menjadi bahan evaluasi dan koreksi bagi pemeriksa (*auditor*), sebagai masukan untuk bahan pengambilan keputusan bagi pemangku kebijakan, maupun koreksi bagi kami dan memberi informasi, pembelajaran dan manfaat bagi pengguna (*stake holder*) lainnya.

Demikian laporan ini disampaikan, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan supervisi, saran dan masukan maupun kritik sehingga CaLK ini dapat kami selesaikan, Semoga Tuhan selalu memberikan Kesehatan Jasmani dan Rohani. Aamiin.

Lampiran – Lampiran

1. Berita acara inventarisasi persediaan
2. Laporan kemajuan fisik dan keuangan
3. Daftar rekap penggunaan dana sumber APBD
4. Register Penutupan Kas per 29 Desember 2023
5. Berita Acara Penutupan Kas per 29 Desember 2023
6. Copy R/K Rek 1191400018 bulan Januari 2023 s/d Desember 2023
7. Copy Surat Tanda Setoran dan copy slip setoran
8. Rekapitulasi Barang ke Neraca per Desember 2023